

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA DEWAN PEMBINA
YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN (PUSARAN KP)**

NOMOR : 001/DP-PUSARAN/I/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN (PUSARAN KP)**

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pencapaian visi dan misi Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya kelautan dan Perikanan (Pusaran KP), dipandang perlu untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Bahwa Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana poin (a) merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusaran KP;
- c. Bahwa untuk keperluan dimaksud pada poin (a) perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020801.AH.01.04 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Kajian dan pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pusaran KP Tanggal 27 – 28 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PUSARAN KP)
- Kedua : Agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Januari Tahun 2022

Ketua Dewan Pembina
Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



ABDUL KADIR KARDING

Tembusan :

1. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI di Jakarta
2. Notaris
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal